

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasar pada hasil analisis regresi linier bergandanya pada data time series Provinsi Jawa Timur selama tahun 2007–2023, maka bisa diambil kesimpulan yaitu:

1. TPT berdampak positif serta signifikan pada tingkat kemiskinan. Berarti, setiap peningkatan TPT akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Hal itu membuktikan bahwasanya pengangguran menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan di Jawa Timur. Masyarakatnya yang tidak bekerja tidak mendapat penghasilan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Keadaan ini memperbesar risiko rumah tangga jatuh ke dalam garis kemiskinan, terlebih dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID-19.
3. IPM tidak berdampak signifikan pada tingkat kemiskinan. Meskipun IPM secara umum meningkat dari tahun ke tahun maupun mencerminkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta standar hidup, namun peningkatan IPM belum memberi dampak yang nyata dan signifikan pada penurunan kemiskinan. Hal itu bisa disebabkan oleh belum meratanya peningkatan kualitas hidup di seluruh lapisan masyarakat ataupun masih adanya kelompok miskin yang tidak terjangkau oleh program-program pembangunan manusia.

4. Upah Minimum berdampak negatif serta signifikan pada tingkat kemiskinan, Berarti, kenaikan upah minimum secara statistik terbukti bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Peningkatan upah minimum memberi tambahan pendapatan bagi para pekerja, khususnya di sektor formal, sehingga meningkatkan daya beli serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan begitu, upah yang layak menjadi salah satu instrumen yang efektif guna mengurangi jumlah penduduk miskin.

5.2 Saran

Berdasar pada hasil penelitiannya serta kesimpulan yang didapat, maka penulis menyampaikan sarannya :

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Diperlukan upaya konkret dalam menurunkan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang luas, pelatihan keterampilan kerja (vokasi), dan dukungan terhadap sektor informal dan UMKM. Program padat karya dan insentif usaha produktif perlu diperluas agar mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.

2. Terkait Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan IPM secara agregat, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaatnya, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Upaya peningkatan pendidikan dan kesehatan perlu menyasar wilayah dengan

IPM rendah agar dampaknya lebih merata dan efektif dalam mengurangi kemiskinan.

3. Kebijakan Upah Minimum

Pemerintah Provinsi bersama dengan stakeholder perlu mempertahankan kebijakan kenaikan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, perlu dilakukan pengawasan agar perusahaan benar-benar menerapkan kebijakan ini secara adil, dan di saat yang sama, sektor informal juga harus mendapatkan perlindungan upah yang sepadan.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya:

Disarankan agar penelitian mendatang menambahkan variabel lain yang relevan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan belanja sosial pemerintah. Selain itu, dapat dilakukan pendekatan data panel antar kabupaten/kota agar memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai variasi kemiskinan di berbagai daerah di Jawa Timur.